

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Renja-PD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; penyusunan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah; perumusan rancangan akhir; dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja-PD berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), hasil evaluasi hasil Renja-PD tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja-PD tahun berjalan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Renstra-PD, dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Renja-PD, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu *“Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”*.

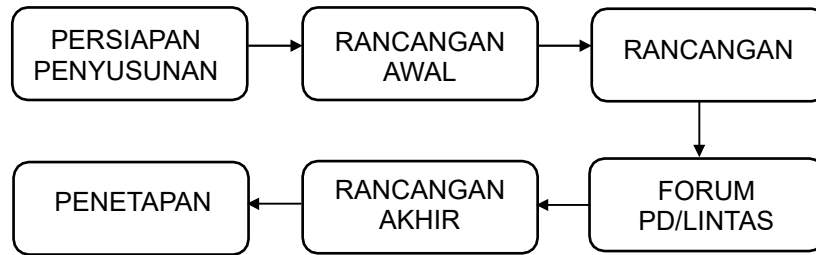
Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan *“Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.”* Renja-PD ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Proses penyusunan rancangan awal Renja-PD Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Padang Panjang Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Bappeda tahun 2024-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Ranwal RKPD tahun 2025. Tahun 2025 merupakan tahun kedua perencanaan pembangunan Kota Padang Panjang yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026. Dokumen Renja Bappeda Kota Padang Panjang tahun 2025 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda serta sejalan dengan tujuan RPD tahun 2024-2026 yaitu *“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Professional, Bersih dan Akuntabel”*.

Penyusunan Renja-PD dilakukan melalui tahapan, meliputi :

1. Persiapan penyusunan, meliputi :
Meliputi pembentukan tim penyusun Renja-PD Tahun 2025; pengumpulan hasil evaluasi renja 2023; dan pengendalian kegiatan tahun 2024.
2. Tahap perumusan rancangan Renja-PD, meliputi :
 - a. Pengolahan data dan informasi
 - b. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah
 - c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun lalu berdasarkan Renstra-PD
 - d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
 - e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD
 - f. Perumusan tujuan dan sasaran
 - g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
 - h. Perumusan kegiatan prioritas
 - i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja-PD
 - j. Penyempurnaan rancangan Renja-PD
3. Penyusunan rancangan, meliputi :
Sinkronisasi yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Bappeda Tahun 2025, dan masukan dari pelaksana kegiatan, serta pembahasan oleh Tim Renja Kota.
4. Pelaksanaan Forum/Lintas Perangkat Daerah.
5. Tahapan penyajian rancangan Renja-PD, sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan dalam bentuk rancangan akhir.
6. Tahapan Penetapan Renja-PD.

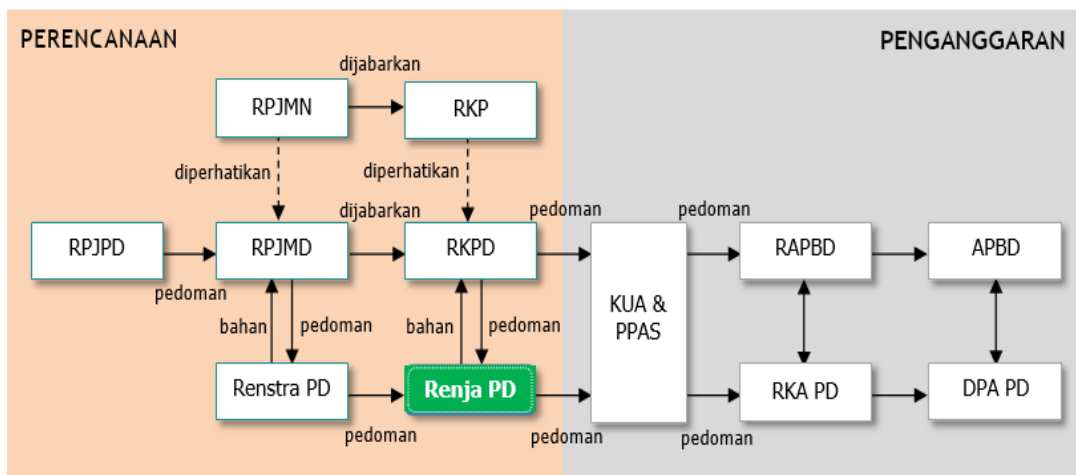
Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Renja Bappeda Kota Padang Panjang



Sumber : Bappeda Kota Padang Panjang

Renja Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah penjabaran dari Renstra Bappeda 2024-2026, untuk melihat hubungan antar dokumen dapat kita lihat pada tabel berikut:

Gambar 1.2
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD



Sumber : Bappeda Kota Padang Panjang

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2025 berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
16. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
17. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6);
18. **Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor.....).**

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Renja Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Bappeda melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025.
2. Sebagai salah satu dokumen acuan dalam penyusunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2024) serta keterkaitan dengan pencapaian Renstra-PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja-PD tahun sebelumnya, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja-PD, serta Program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun n dan Perkiraan Maju tahun $n+1$

Bab V Penutup

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Tahun 2018-2023

Kualitas Renja-PD yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yakni untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja-PD yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja-PD tahun sebelumnya, dikaitkan dengan pencapaian Renstra-PD. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja-PD tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra-PD adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam melakukan penyusunan Renja Bappeda Tahun 2025, perlu diperhatikan hasil evaluasi Renja-PD tahun lalu (2023) terhadap capaian Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2018-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja-PD untuk tahun berjalan (2024). Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Bappeda sampai dengan tahun berjalan terhadap target kinerja tahun 2024. Hal ini juga perlu dilihat hasil evaluasi terhadap capaian Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2018-2023 dengan kinerja tahun 2023 (tahun ke-lima).

2.1.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2024-2026 sampai dengan Tahun 2024

Secara umum pelaksanaan Renja Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2023, dapat terlaksana sesuai dengan target rencana yang telah ditetapkan, dengan rata-rata realisasi fisik telah mencapai 100%. Begitu juga berdasarkan hasil revidi berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 realisasi capaian kinerja mencapai 100%.

Secara lebih terperinci hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian
(Berdasarkan Renstra Perubahan Tahun 2018-2023)
Kota Padang Panjang

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024	
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 =9	11
3 1	PENUNJANG URUSAN									
3 01 01	PERENCANAAN									
5 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98,00%	98,00%	98,00%	98,77%	100,79%			
5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	94,00%	94,00%	94,00%	98,88%	105,19%			
5 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	33 orang	33 orang	33 orang	33 orang	100%			
5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%			
5 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 jenis	5 paket	5 jenis	5 jenis	100%			
5 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 jenis	2 paket	2 jenis	2 jenis	100%			
5 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 jenis	3 paket	3 jenis	3 jenis	100%			
5 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 laporan	100 laporan	100 laporan	100 laporan	100%			
5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%		100%	100%	100%			
5 01 01 2.07 0005	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	5 unit	4 Unit	3 Unit	3 Unit	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024	
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 9	11
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%			
5 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%			
5 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	5 jenis	5 laporan	5 jenis	5 jenis	100%			
5 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	7 Laporan	7 laporan	7 Laporan	7 Laporan	100%			
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%			
5 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	21 Unit	21 unit	21 Unit	21 Unit	100%			
5 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	8 Unit	8 unit	8 Unit	8 Unit	100%			
5 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%			
5 01 02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	80%	70%	80%	80%	100%			
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun		3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
5 01 02 2.01 0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		1 dokumen						
		Jumlah laporan investigasi pembangunan		1 dokumen						
5 01 02 2.01 0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara musrenbang Kab/Kota	1 BA	1 BA	1 BA	1 BA	100%			
5 01 02 2.01 0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kab/kota yang ditetapkan	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	24 OPD	100%			
		Jumlah OPD yang Dikoordinir Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan	23 OPD		23 OPD		100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024	
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 9	11
5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat ketersediaan data OPD dalam sistem informasi pembangunan daerah	85%	75%	85%	88,53%	104%			
5 01 02 2.02 0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah modul aplikasi perencanaan yang dikembangkan	3 aplikasi	3 aplikasi	3 aplikasi	3 aplikasi	100%			
		Jumlah Masukan Analisis data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (semua Perencanaan Pembangunan Dearah)	3 Masukan		3 Masukan	3 Masukan	100%			
5 01 02 2.02 2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah data dan perencanaan yang dikelola	41 Elemen Data	-	41 Elemen Data	41 data	100%			
		Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	23 Orang		23 Orang	23 Orang	100%			
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%			
5 01 02 2.03 0003	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan dan dan hasil pengendalian pelaksanaan RKPd								
5 01 02 2.03 0004	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	10 Laporan	5 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100%			
5 01 02 2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah modul aplikasi yang dikembangkan	5 Modul		5 Modul	5 Modul	100%			
5 01 02 2.04 0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	41 urusan	41 urusan	41 urusan	41 urusan	100%			
5 01 03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	83%	50% (12 OPD)	83%	83% (19 OPD)	100%			
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	83%	78%	83%	83%	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024	
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 =9	11
5 01 03 2.01 0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Monitoring dan Evaluasi	23 OPD	23 PD	23 OPD	23 OPD	100%			
5 01 03 2.01 0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%			
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang infrastruktur dan kewilayahan	75%	90%	75%	75%	100%			
5 01 03 2.03 0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renjadengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%			
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase koordinasi perencanaan dibawah koordinasi bidang perekonomian dan SDA	75%	73%	75%	75%	100%			
5 01 03 2.02 0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renjadengan RKPDP/RPJMD pada Bidang SDA	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%			
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
5 05 02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kelitbangan daerah	70%	65%	70%	70%	100%			
5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	jumlah dokumen kelitbangan daerah Bidang Sosial dan Kependudukan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%			
5 05 02 2.02 0001	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah dokumen kajian yang disusun	1 Dokumen							
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi daerah yang masuk pengukuran indeks inovasi daerah	100%	100%	100%	Sangat Inovatif	100%			
5 05 02 2.04 0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	24 OPD				

Sumber : Bappeda Kota Padang Panjang

Tabel 2.2
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian
(Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026)
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Padang Panjang

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024	
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 9	11
3 1	PENUNJANG URUSAN									
5 01 01	PERENCANAAN									
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100,00%					100 Persen	100 Persen	100%
5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%					100 Persen	100 Persen	100%
5 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1386 Orang/ bulan					462 Orang/ bulan	462 Orang/ bulan	100%
5 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%					100 Persen	100 Persen	100%
5 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	43 Paket					43 Paket	43 Paket	100%
5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%					100 Persen	100 Persen	100%
5 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket					4 Paket	4 Paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024	
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10=9	11
5 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket					4 Paket	4 Paket	100%
5 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket					4 Paket	4 Paket	100%
5 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan					24 Laporan	24 Laporan	100%
5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	100%					100 Persen	100 Persen	100%
5 01 01 2.07 0004	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan	2 Unit							
5 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19 paket					19 Paket	19 Paket	100%
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%					100 Persen	100 Persen	100%
5 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan					4 Laporan	4 Laporan	100%
5 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108 Laporan					36 Laporan	36 Laporan	100%
5 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan					12 Laporan	12 Laporan	100%
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100%					100 Persen	100 Persen	100%
5 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60 Unit					20 Unit	20 Unit	100%
5 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit					50 Unit	50 Unit	100%
5 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit					1 Unit	1 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024	
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10=9	11
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	86%					82 Persen	82 Persen	100%
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan	3 dokumen					2 dokumen	2 dokumen	100%
5 01 02 2.01 0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	3 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5 01 02 2.01 0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	5 Berita Acara					1 Berita Acara	1 Berita Acara	100%
5 01 02 2.01 0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	15 Dokumen					5 Dokumen	5 Dokumen	100%
5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat ketersediaan data perencanaan pembanguinan pada OPD dalam sistem pengelolaan data	88,00%					86 Persen	86 Persen	100%
5 01 02 2.02 0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	12 dokumen					4 dokumen	4 dokumen	100%
5 01 02 2.03 0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	30 Laporan					10 Laporan	10 Laporan	100%
5 01 02 2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah modul aplikasi yang dikembangkan	15 modul					5 modul	5 modul	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024	
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10=9	11
5 01 02 2.04 0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	123 Dokumen					41 Dokumen	41 Dokumen	100%
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	92,00%					85 Persen	85 Persen	100%
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	92,00%					85 Persen	85 Persen	100%
5 01 03 2.01 0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	39 Laporan					13 Laporan	13 Laporan	100%
5 01 03 2.01 0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	39 Laporan					13 Laporan	13 Laporan	100%
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang perekonomian dan SDA	92,00%					85 Persen	85 Persen	100%
5 01 03 2.02 0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	24 Laporan					8 Laporan	8 Laporan	100%
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang infrastruktur dan kewilayahan	92,00%					85 Persen	85 Persen	100%
5 01 03 2.03 0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	6 Laporan					2 Laporan	2 Laporan	100%
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah dokumen kelitbangan yang dihasilkan	24 Dokumen					6 Dokumen	6 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024	
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10=9	11
		Persentase inovasi daerah yang memiliki nilai kematangan di atas 90	76,00%					72 Persen	72 Persen	100%
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun	3 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	100%
5 05 02 2.01 0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	3 Laporan					1 Laporan	1 Laporan	100%
5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang sosial dan kependudukan yang disusun	3 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	100%
5 05 02 2.02 0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	3 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun	3 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	100%
5 05 02 2.03 0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	3 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi daerah yang masuk pengukuran indeks inovasi daerah	100,00%					100 Persen	100 Persen	100%
5 05 02 2.04 0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Sumber : Bappeda Kota Padang Panjang

Berdasarkan Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian (Berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023) dan Tabel 2.2 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian (Berdasarkan Renstra Perubahan 2024-2026) Kota Padang Panjang diatas dapat dijelaskan bahwa Bappeda melaksanakan 4 Program Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Program Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi target 98 % capaian kinerja tahun 2023 sebesar 98,77% persentasenya 100%, program ini terdiri dari 5 kegiatan dan 12 sub kegiatan dengan persentase capaian kinerjanya 100%.
2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah target kinerja tahun 2023 sebesar 80 % dengan capaian 80% persentase capaian 100%, program ini terdiri dari 4 Kegiatan dengan 6 sub kegiatan yang dilaksanakan persentase capaian 100%. Sementara itu ada 2 (dua) sub kegiatan yang dihilangkan pada perubahan APBD Tahun 2023 yaitu Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya (sub kegiatan ini berupa investigasi hasil musrenbang mulai tahun 2023 pelaksanaan investigasi ini dilaksanakan oleh OPD teknis) dan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (sub kegiatan ini berupa Rapat data dan metadata sudah dapat diakomodir dalam Pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah).
3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Program Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik target tahun 2023 sebesar 83% dengan capaian 83% ada 19 OPD yang sudah memiliki dokumen perencanaan sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 dan persentase capaiannya 100%. Program ini terdiri dari 3 kegiatan dengan 4 sub kegiatan yang dilaksanakan persentase capaian 100%.
4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah dengan indikator Program Persentase hasil kelitbangan daerah yang diimplementasikan dalam pencapaian sasaran daerah target tahun 2023 sebesar 75% dengan capaian 75% dan

persentase capaiannya 100% Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan yang dilaksanakan persentase capaian 100%.

2.1.2. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran perubahan tahun 2023 dan anggaran tahun 2024 beserta perkiraan target realisasi anggaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Keuangan Renja Perangkat Daerah dan Perkiraan Realisasi s/d Tahun 2024

Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Anggaran program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp)	Perkiraan Realisasi Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)	
		Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024)
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.351.268.003	5.190.281.377	96,99%	5.612.607.014	5.612.607.014	100%
5 01 01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.188.181.748	4.113.457.951	98,22%	4.275.859.174	4.275.859.174	100%
5 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.188.181.748	4.113.457.951	98,22%	4.275.859.174	4.275.859.174	100%
5 01 01 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				21.500.000	21.500.000	100%
5 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	21.500.000	21.500.000	100%
5 01 01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	590.543.800	548.977.603	92,96%	443.620.650	443.620.650	100%
5 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	3.977.700	3.818.000	95,99%	3.974.200	3.974.200	100%
5 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.746.400	49.899.930	89,51%	60.135.900	60.135.900	100%
5 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.020.750	10.315.900	64,39%	9.928.550	9.928.550	100%
5 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	514.798.950	484.943.773	94,20%	369.582.000	369.582.000	100%
5 01 01 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000	17.522.500,0	87,61%	28.707.600	28.707.600	100%
	Pengadaan Mebel				28.707.600	28.707.600	100%
5 01 01 2.07 0005	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	17.522.500	87,61%	-	-	-
5 01 01 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.739.555	186.046.736	89,13%	385.301.590	385.301.590	100%
5 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	2.600.000	86,67%	2.080.000	2.080.000	100%
5 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.197.955	21.572.373	63,08%	35.849.590	35.849.590	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Anggaran program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp)	Perkiraan Realisasi Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)	
		Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (Rp)	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024)
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6
5 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	171.541.600	161.874.363	94,36%	347.372.000	347.372.000	100%
5 01 01 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	343.802.900	324.276.587	94,32%	457.618.000	457.618.000	100%
5 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	188.562.900	172.638.987	91,56%	343.028.000	343.028.000	100%
5 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.060.000	18.494.600	87,82%	23.110.000	23.110.000	100%
5 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	134.180.000	133.143.000	99,23%	91.480.000	91.480.000	100%
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	340.502.800	305.762.241	89,80%	577.190.250	577.190.250	100%
5 01 02 2.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	264.963.000	240.805.890	90,88%	497.608.750	497.608.750	100%
5 01 02 2.01 0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	-	-	-	19.999.850	19.999.850	100%
5 01 02 2.01 0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	46.667.100	45.100.620	96,64%	109.039.850	109.039.850	100%
5 01 02 2.01 0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	218.295.900	195.705.270	89,65%	368.569.050	368.569.050	100%
5 01 02 2.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	19.998.500	19.998.500	100%
5 01 02 2.02 0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	19.998.500	19.998.500	100%
5 01 02 2.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	7.144.000	4.928.800	68,99%	12.893.000	12.893.000	100%
5 01 02 2.03 0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	7.144.000	4.928.800	68,99%	12.893.000	12.893.000	100%
5 01 02 2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	68.395.800	60.027.551	87,76%	46.690.000	46.690.000	100%
5 01 02 2.04 0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	68.395.800	60.027.551	87,76%	46.690.000	46.690.000	100%
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	101.797.050	89.022.650	87,45%	130.000.000	130.000.000	100%
5 01 03 2.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	51.623.000	43.516.550	84,30%	60.000.000	60.000.000	100%
5 01 03 2.01 0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	16.824.500	13.815.300	82,11%	20.003.400	20.003.400	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Anggaran program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp)	Perkiraan Realisasi Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)	
		Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (Rp)	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024)
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6
5 01 03 2.01 0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	34.798.500	29.701.250	85,35%	39.996.600	39.996.600	100%
5 01 03 2.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	14.999.750	13.015.100	86,77	20.000.000	20.000.000	100%
5 01 03 2.02 0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	14.999.750	13.015.100	86,77	20.000.000	20.000.000	100%
5 01 03 2.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	35.174.300	32.491.000	92,37	50.000.000	50.000.000	100%
5 01 03 2.03 0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	35.174.300	32.491.000	92,37	50.000.000	50.000.000	100%
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	50.039.750	41.301.440	82,54%	119.999.650	119.999.650	100%
5 05 02 2.01	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				29.999.750	29.999.750	100%
5 05 02 2.01 0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				29.999.750	29.999.750	100%
5 05 02 2.02	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan				20.000.000	20.000.000	100%
5 05 02 2.02 0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		-		20.000.000	20.000.000	100%
5 05 02 2.03	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				20.000.000	20.000.000	100%
5 05 02 2.03 0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		-		20.000.000	20.000.000	100%
5 05 02 2.04	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	50.039.750	41.301.440	82,54	49.999.900	49.999.900	100%
5 05 02 2.04 0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	50.039.750	41.301.440	82,54%	49.999.900	49.999.900	100%

Sumber : Bappeda Kota Padang Panjang

Berdasarkan hasil evaluasi Renstra Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, capaian kinerja tahun anggaran 2023 dapat terlaksana dengan baik dengan 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan. Ada beberapa sub kegiatan yang tidak mencapai realisasi keuangan 75% dan sub kegiatan yang dihilangkan pada perubahan anggaran Tahun 2023, yaitu :

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (64,39%). Biaya fotocopy cukup banyak bersisa, hal karena kita pemanfaatan aplikasi e-office dan srikandi yang

- meminimalkan pemanfaatan kertas, dan biaya cetak dan jilid sesuai kebutuhan karena sebagian besar dokumen tersedia dalam bentuk softcopy.
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (63,08%). Biaya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik berupa pembayaran tagihan air ke PDAM dan tagihan listrik ke PLN, dimana pembayaran dilakukan sesuai dengan tagihan pemakaian air dan listrik per bulannya.
 - c. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah (68,99%). Sub kegiatan ini melakukan evaluasi pelaksanaan RPJMD/RPD Kota Padang Panjang setiap tahun periode RPJMD/RPD berjalan, dan evaluasi pelaksanaan RKPD secara triwulan. Untuk melihat sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Sisa anggaran berupa belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp.1.291.500,- yang direncanakan untuk rapat evaluasi di bulan Desember namun karena keterbatasan waktu tidak dilaksanakan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan Bappeda Kota Padang Panjang adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah di Kota Padang Panjang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Bappeda Kota Padang Panjang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran, target evaluasi capaian kinerja sasaran “meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah” dengan indikator kinerja sasaran yakni, “persentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah untuk tahun 2023 dengan target sebesar 73%. Disamping itu juga dilakukan pengukuran terhadap capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci yang sudah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Padang Panjang

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian (Tahun)		Proyeksi (Tahun)		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2022	2023	
1	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RENSTRA 2018-2023												
T	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah			B (62,30)	B (63,10)			B (63,10)	B (63,28)			
T	Indeks Inovasi Daerah			Sangat Inovatif	Sangat Inovatif			erinovatif	Sangat novatif			
S	Presentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah			72%	73%				68.75%			
T	Tingkat Kemiskinan			56.65	5.08			5.14	5.24			
S	Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan			95%	95%			95%	95%			
T	Prevalensi Stunting			15.51	13.98			16.80				
S	Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting			91.70%	93%			91.70%	93%			
IP	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah			75%	80%			75%	80%			
IP	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik			60%	83%			60%	83%			
IP	Persentase hasil kelitbangan daerah yang dimanfaatkan			65%	70%			65%	70%			
IP	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi			98%	98%			98%	98%			
RENSTRA 2024-2026												
T	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP Kota					19.19	19.46			19.19	19.46	
S	Indeks Kualitas Perencanaan					70	70,5			70	70,5	
S	Indeks Inovasi Daerah					Sangat novatif	Sangat novatif			Sangat novatif	Sangat novatif	
IP	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah					82%	84%			82%	84%	
IP	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik					85%	88%			85%	88%	
IP	Persentase inovasi daerah yang memiliki nilai kematangan di atas 90					72%	74%			72%	74%	
IP	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi					99.20%	99.40%			99.20%	99.40%	

Sumber : Bappeda Kota Padang Panjang

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Bappeda tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan “Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah” memiliki 2 indikator kinerja yaitu

- a. Indikator Kinerja Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022 dengan predikat B (62.30) naik menjadi predikat B dengan nilai 63.28.
 - b. Indikator Kinerja Indeks Inovasi Daerah pada Tahun 2023 Padang Panjang memperoleh predikat Kota Sangat Inovatif hal ini sedikit mengalami penurunan dari tahun 2021 dan 2022 dengan predikat Kota Terinovatif disebabkan oleh sebagian besar inovasi yang ada di Kota Padang Panjang belum dilakukan pembaharuan.
2. Sasaran Bappeda Kota Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :
- a. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, dengan Indikator “Persentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja”. Pada tahun 2023 adalah sebesar 68,75% (sebagian besar data sasaran daerah tahun 2023 belum rilis), untuk sementara persentase masih mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 69,71%.
 - b. Meningkatkan konsistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, dengan Indikator “Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan”. Pada tahun 2023, realisasi dari indikator ini adalah sebesar 100%, capaian ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 yakni sebesar 96,37%.
 - c. Meningkatkan konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting, dengan Indikator “Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting”. Pada tahun 2023, realisasi dari indikator ini adalah sebesar 100%, capaian ini sama dengan tahun 2022.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai OPD yang melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal koordinator perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan disadari bahwa Bappeda belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Adapun perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana dimaksud adalah penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun perencanaan tahunan, perencanaan skala kota, maupun perencanaan OPD di lingkup Pemerintah Kota padang Panjang.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dijabarkan lebih detail dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah. Namun pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut belum terlaksana secara menyeluruh dan optimal.

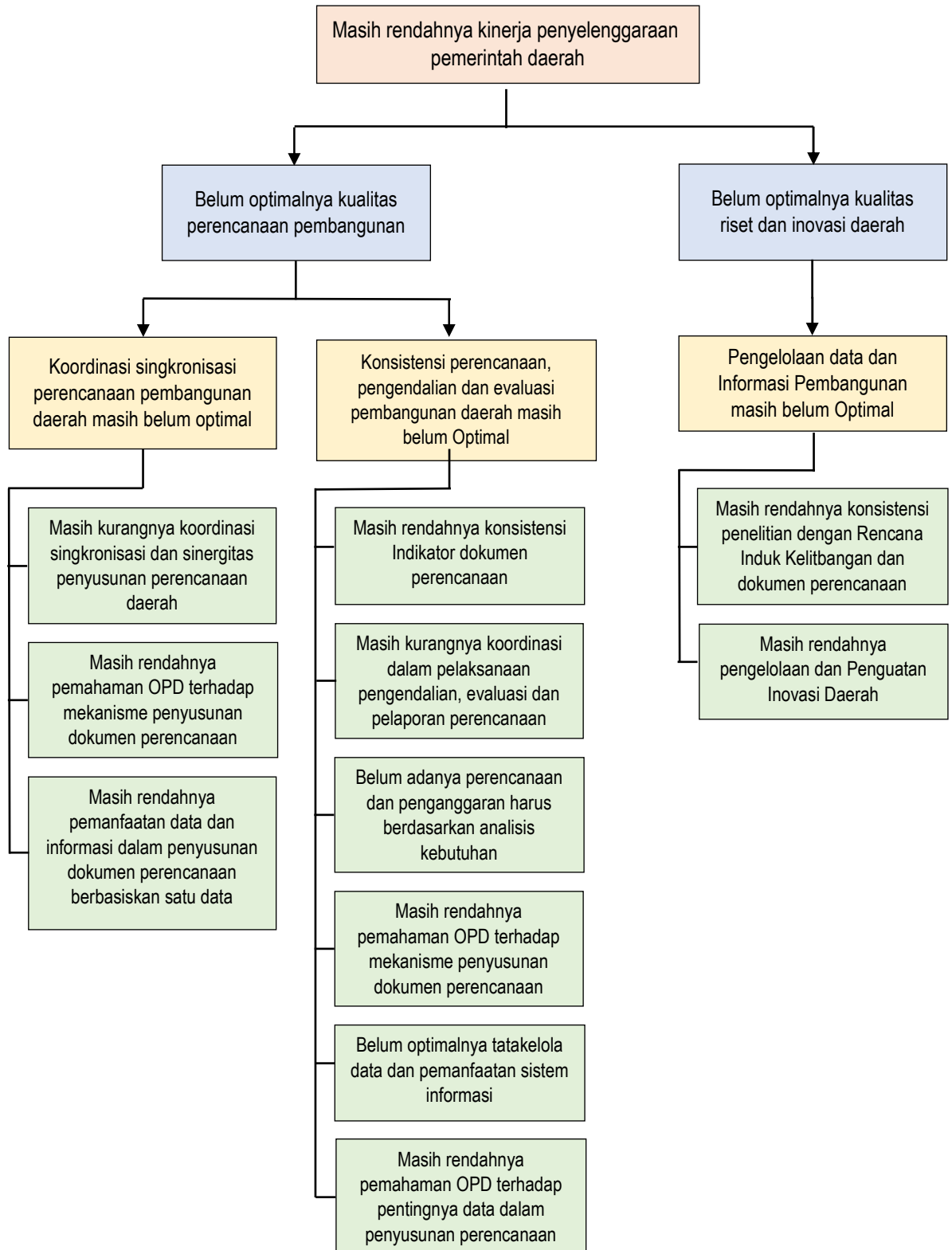
Belum terlaksananya tugas dan fungsi Bappeda secara optimal dikarenakan adanya beberapa permasalahan dan hambatan, antara lain :

Tabel 2.5
Pemetaan Permasalahan Bappeda Kota Padang Panjang

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Ket.
1.	Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah belum optimal	Implementasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum optimal	Pelaksanaan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar tingkat pemerintahan belum optimal	
			Perumusan dokumen perencanaan pembangunan pada setiap bidang urusan belum optimal	
			Perencanaan penganggaran pada dokumen perencanaan belum didasarkan pada rincian kebutuhan	
			Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah belum terintegrasi antar sektor	
		Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal	Dokumen perencanaan dan penganggaran belum konsisten	
			Ketersediaan data Analisa capaian kinerja perangkat daerah belum optimal	
			Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan kurang memadai	
			Sistem informasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah belum tersedia	
2.	Penelitian dan Pengembangan	Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan belum optimal	Pemanfaatan hasil riset/ penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah belum berjalan baik;	
			Penerapan Sistem Inovasi dalam perumusan kebijakan perencanaan daerah masih belum optimal	

Sumber : Bappeda Kota Padang Panjang

Gambar 2.1
Pohon Masalah Bappeda Kota Padang Panjang



Sumber : Bappeda Kota Padang Panjang

Isu strategis pembangunan Kota Padang Panjang untuk penentuan kebijakan perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana tabel tabel berikut:

Tabel 2.6

Isu-isu Strategis Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

No	Isu Utama	Isu Strategis
1	Isu Pembangunan Manusia	a. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat c. Kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dialami perempuan dalam merasakan manfaat pembangunan d. Peningkatan daya saing kepemudaan dan prestasi keolahragaan
2	Isu Tata Kelola Pemerintahan	a. Implementasi 8 area perubahan Reformasi Birokrasi
3	Isu Pembangunan Ekonomi	a. Peningkatan pertumbuhan sektor unggulan daerah b. Masih rendahnya nilai Investasi c. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran d. rendahnya pendapatan masyarakat
4	Isu Tatahan Kehidupan Masyarakat	a. Mulai lunturnya nilai-nilai Adat dan Budaya ditengah masyarakat b. Masih terbatas pemahaman masyarakat dalam pengamalan nilai-nilai keagamaan c. Belum optimalnya layanan ketentraman dan ketertiban umum d. penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial
5	Isu kualitas infrastrutur dan lingkungan hidup	a. layanan infrastruktur dasar b. kesesuaian pemanfaatan ruang c. kualitas air, udara, tutupan lahan

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Secara umum isu utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda adalah dengan Tata Kelola Pemerintahan khususnya terkait Implementasi 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan reviu penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda selama periode sebelumnya, serta berdasarkan permasalahan dan hambatan yang ada, dapat diidentifikasi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda, sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya Penyusunan Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Kota Padang Panjang.
- b. Belum optimalnya Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Padang Panjang.
- c. Belum optimalnya Pelaksanaan dan tindak lanjut Penelitian Dan Pengembangan Daerah di Kota Padang Panjang.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Bappeda disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD. Mengingat keterbatasan kapasitas keuangan berdasarkan perhitungan proyeksi kondisi keuangan Kota Padang Panjang pada rancangan awal RKPD, maka ada beberapa program dan kegiatan pada Renja Bappeda dijadikan program dan kegiatan prioritas kedua. Untuk lebih jelasnya review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025. Kota Padang Panjang dapat dijelaskan melalui Tabel 2.6.

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dengan Renja BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD 2025 (Sesuai Renstra 2024-2026)					Hasil Analisis Kebutuhan (Sesuai PI yang telah dibagikan)					SELISH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13=11-6	12
	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				21.167.668.566					6.758.355.449	(14.409.313.117)	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				21.167.668.566					6.758.355.449	(14.409.313.117)	
	PERENCANAAN				21.042.668.566					6.633.355.449	(14.409.313.117)	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100,00%	5.375.668.566	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100,00%	5.932.815.209	557.146.643	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100%	3.880.568.566	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100%	4.310.315.209	429.746.643	
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	462 Orang/bulan	3.880.568.566	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	462 Orang/bulan	4.310.315.209	429.746.643	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	0%	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	0%	-	-	
X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket	-	-	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100%	549.100.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100%	549.100.000	-	
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.100.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.100.000	-	
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	67.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	67.500.000	-	

No	Rancangan Awal RKPD 2025 (Sesuai Renstra 2024-2026)					Hasil Analisis Kebutuhan (Sesuai PI yang telah dibagikan)					SELISH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13=11-6	12
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	27.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	27.500.000	-	
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	450.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	450.000.000	-	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	100%	290.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	100%	400.000.000	110.000.000	
X.XX.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	270.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	350.000.000	80.000.000	
X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 paket	-	Pengadaan Mebel	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 paket	-	-	
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	50.000.000	30.000.000	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	226.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	335.400.000	109.400.000	
X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	3.000.000	-	
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	38.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	30.000.000	(8.000.000)	
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	185.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	302.400.000	117.400.000	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100%	430.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100%	338.000.000	(92.000.000)	
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	20 Unit	240.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Kota Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	20 Unit	248.000.000	8.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2025 (Sesuai Renstra 2024-2026)					Hasil Analisis Kebutuhan (Sesuai PI yang telah dibagikan)					SELISH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13=11-6	12
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	40.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	40.000.000	-	
X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	(100.000.000)	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kota Padang Panjang	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	84,00%	15.507.000.000	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kota Padang Panjang	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	84,00%	540.540.240	(14.966.459.760)	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kota Padang Panjang	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan	2 dokumen	15.357.000.000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kota Padang Panjang	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan	2 dokumen	485.540.240	(14.871.459.760)	
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen	35.000.000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen	35.000.000	-	
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	70.000.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	100.000.000	30.000.000	
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	6 Dokumen	15.252.000.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	6 Dokumen	350.540.240	(14.901.459.760)	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Padang Panjang	Tingkat ketersediaan data perencanaan pembangunan pada OPD dalam sistem pengelolaan data	87%	15.000.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Padang Panjang	Tingkat ketersediaan data perencanaan pembangunan pada OPD dalam sistem pengelolaan data	87%	15.000.000	-	
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	15.000.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	15.000.000	-	

No	Rancangan Awal RKPD 2025 (Sesuai Renstra 2024-2026)					Hasil Analisis Kebutuhan (Sesuai PI yang telah dibagikan)					SELISH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13=11-6	12
5.01.02.2.0 3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	4 dokumen	15.000.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	4 dokumen	15.000.000	-	
5.01.02.2.0 3.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	10 Laporan	15.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	10 Laporan	15.000.000	-	
5.01.02.2.0 4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah modul aplikasi yang dikembangkan	5 modul	120.000.000	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah modul aplikasi yang dikembangkan	5 modul	25.000.000	(95.000.000)	
5.01.02.2.0 4.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	41 Dokumen	120.000.000	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	41 Dokumen	25.000.000	(95.000.000)	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kota Padang Panjang	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	88,00%	160.000.000	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kota Padang Panjang	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	88,00%	160.000.000	-	
5.01.03.2.0 1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Padang Panjang	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	88%	75.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Padang Panjang	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	88%	75.000.000	-	
5.01.03.2.0 1.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	13 Laporan	35.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	13 Laporan	35.000.000	-	
5.01.03.2.0 1.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	13 Laporan	40.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	13 Laporan	40.000.000	-	
5.01.03.2.0 2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Padang Panjang	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang perekonomian dan SDA	88%	35.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Padang Panjang	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang perekonomian dan SDA	88%	35.000.000	-	

No	Rancangan Awal RKPD 2025 (Sesuai Renstra 2024-2026)					Hasil Analisis Kebutuhan (Sesuai PI yang telah dibagikan)					SELISH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13=11-6	12
5.01.03.2.0 2.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang SDA	8 Laporan	35.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang SDA	8 Laporan	35.000.000	-	
5.01.03.2.0 3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Kota Padang Panjang	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang infrastruktur dan kewilayahan	88%	50.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Kota Padang Panjang	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang infrastruktur dan kewilayahan	88%	50.000.000	-	
5.01.03.2.0 3.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	50.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	50.000.000	-	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				125.000.000		Kota Padang Panjang			125.000.000	-	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kota Padang Panjang	Jumlah dokumen kelitbangan yang dihasilkan	8 Dokumen	125.000.000	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kota Padang Panjang	Jumlah dokumen kelitbangan yang dihasilkan	8 Dokumen	125.000.000	-	
		Kota Padang Panjang	Persentase inovasi daerah yang memiliki nilai kematangan di atas 90	74,00%			Kota Padang Panjang	Persentase inovasi daerah yang memiliki nilai kematangan di atas 90	74,00%		-	
5.05.02.2.0 1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kota Padang Panjang	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun	1 dokumen	15.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kota Padang Panjang	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun	1 dokumen	15.000.000	-	
5.05.02.2.0 1.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	15.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	15.000.000	-	
5.05.02.2.0 2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kota Padang Panjang	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang sosial dan kependudukan yang disusun	1 dokumen	22.500.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kota Padang Panjang	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang sosial dan kependudukan yang disusun	1 dokumen	22.500.000	-	
5.05.02.2.0 2.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	22.500.000	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	22.500.000	-	

No	Rancangan Awal RKPD 2025 (Sesuai Renstra 2024-2026)					Hasil Analisis Kebutuhan (Sesuai PI yang telah dibagikan)					SELISH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13=11-6	12
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kota Padang Panjang	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun	1 dokumen	22.500.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kota Padang Panjang	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun	1 dokumen	22.500.000	-	
5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	22.500.000	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	22.500.000	-	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kota Padang Panjang	Persentase inovasi daerah yang masuk pengukuran indeks inovasi daerah	100%	65.000.000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kota Padang Panjang	Persentase inovasi daerah yang masuk pengukuran indeks inovasi daerah	100%	65.000.000	-	
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	65.000.000	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	65.000.000	-	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bappeda Kota Padang Panjang dalam proses penyusunan perencanaan telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Bappeda juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Pada Musrenbang RKPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda selaku Organisasi Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Secara umum tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan wujud pencapaian visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan pembangunan dijabarkan dan ditunjukkan dengan jelas pada sasaran yang dirumuskan secara spesifik untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu untuk mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah perlu dirumuskan berdasarkan kondisi, permasalahan, potensi serta dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Dinamika dalam pembangunan daerah tidak hanya diperhatikan secara spasial, artinya tidak hanya memperhatikan dinamika di lingkup satu wilayah saja, melainkan juga dengan memperhatikan dinamika yang terjadi secara regional maupun nasional. Untuk itu dalam menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah juga harus disinergikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah provinsi dan nasional.

3.1.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, serta juga tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Tema Pembangunan Jangka Menengah Tahap Pertama RPJPN Tahun 2025-2029 yakni ***“Penguatan Fondasi Transformasi”*** dengan fokus kepada :

1. Transformasi Sosial, yang difokuskan pada Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif, dengan transformasi prioritas (game changer) yakni :
 - a. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan menengah)
 - b. Peningkatan partisipasi Pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi Pendidikan
 - c. Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga Pendidikan dan Kesehatan seperti guru, tenaga medis dan tenaga Kesehatan
 - d. Investasi pelayanan Kesehatan primer, penuntasan stunting, dan eliminasi

- penyakit menular dan penyakit tropis terutama Tuberkulosis dan kusta
- e. Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi
2. Transformasi Ekonomi, yang difokuskan pada Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, dengan transformasi prioritas (game changer) yakni :
 - a. Peningkatan anggarann lptekin nasional menuju komersialisasi oleh industri
 - b. Industrialisasi : hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, teknologi dan inovasi serta berorientasi ekspor
 - c. Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan cara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau
 - d. *Superplatform* untuk percepatan transformasi dan produksi talenta digital
 - e. Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi
 - f. Pembangunan ibukota Nusantara IKN
 3. Transformasi Tata Kelola, yang difokuskan pada Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil, dengan transformasi prioritas (game changer) yakni :
 - a. Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem penggajian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi
 - b. Penguatan integritas partai politik
 4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia, yang difokuskan pada Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi sebagai landasan transformasi dan Pembangunan, dengan dengan transformasi prioritas (game changer) yakni :
 - a. Transformasi sistem penuntutan menuju single prosecution system dan transformasi lembaga Kejaksaan sebagai Advocaat general
 - b. Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan value chain industri nasional
 - c. Reformasi perencanaan dan fiskal; perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi

- APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiscal
- d. Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, yang difokuskan pada Memperkuat ketahanan social budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar Pembangunan, dengan transformasi prioritas (game changer) yakni :
 - a. Penguatan karakter dan jati diri bangsa
 - b. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu Ke Hilir
 - c. Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan Pendekatan terpadu FES Nexus (food, energi, water)

3.1.2. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu ***“Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan”***, dengan penjabaran misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		Menurunnya prevalensi stunting
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan
		Meningkatnya Daya Saing Masyarakat
Misi 2: Meningkatkan Tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara’-Syara’ Basandi Kitabullah	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	Meningkatnya Ketahanan sosial Budaya masyarakat yang berlandaskan ASB-SBK
		Meningkatnya Budaya Literasi
		Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Misi 3: Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)
		Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan
		Meningkatnya pendapatan Petani Hutan

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 4: Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital	Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/ Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	Sumatera barat sebagai pusat perdagangan
		Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah
		Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera
		Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor
		Meningkatnya pertumbuhan Investasi
		Meningkatnya peran ekonomi digital
Misi 5: Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat
		Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat
Misi 6: Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan berkelanjutan	Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi
		Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
		Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas
		Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian
		Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan
Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Terwujudnya kualitas tata Kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel
		Meningkatnya kapabilitas birokrasi
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 merupakan tahun keempat dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing;

2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2021-2026, maka tema pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yaitu: ***"Peningkatan Daya Saing Daerah"***.

3.1.3. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah serta nantinya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025 mengacu pada RPD Kota Padang Panjang 2024-2026.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan secara keseluruhan. Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diterjemahkan kedalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah maupun perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah.

Target dari tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025 dirumuskan dengan berdasarkan sasaran RPD 2024-2026, hasil evaluasi pembangunan tahun 2023, serta kebijakan pembangunan nasional tahun 2025. Berikut dijelaskan penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal (2022)	Outlook 2023	2024	2025	2026	Target Akhir Perencanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia	78,78	78,97	79,02	79,38	79,73	79,73
			1 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	11,92	11,93	11,94	11,96	11,98
				Harapan Lama Sekolah	15,07	15,08	15,09	15,10	15,11
			2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	73,02	73,03	73,04	73,05	73,06
				Prevelansi Stunting	16,80	15,40	14,00	12,60	11,20
			3 Meningkatnya pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, pemenuhan hak dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan gender	69,44	70,84	71,44	73,05	74,06
				Predikat Kota Layak Anak	nindya	nindya	utama	utama	utama
			4 Meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Status Kota layak pemuda	-	-	Menuju Pratama	Menuju Pratama	Pratama
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel			Indeks Reformasi Birokrasi	59,40	56,42	57,62	58,82	60,02
			5 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP	62,91	63,10	63,98	64,86	65,74
				IPKD (Indek Pengelolaan Keuangan Daerah)	70,61	70,85	71,00	71,50	72,00
				Nilai Sistem Merit	Sangat Baik (325)	Sangat Baik (328)	Sangat Baik (330)	Sangat Baik (335)	Sangat Baik (340)
				Maturitas SPIP	2+	2+	3 (3.1)	3 (3.2)	3 (3.3)
				Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	85	88	90	93	95
				Indeks SPBE	2,09	2,40	2,70	2,85	3,00

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	Kondisi Awal (2022)	Outlook 2023	2024	2025	2026	Target Akhir Perencanaan
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
3	Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing disertai dengan penurunan ketimpangan			Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,39	4,79	5,20	5,60	6,00	6,00
		6	Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah	LPE sektor Perdagangan	5,28	5,82	6,36	6,90	7,44	7,44
				LPE sektor pertanian	5,54	5,59	5,64	5,69	5,74	5,74
				LPE sektor akomodasi makandan minum	10,47	10,71	10,95	11,19	11,43	11,43
		7	Meningkatnya investasi	Persentase pertumbuhan nilai investasi	6	6	6	6	100	100
		8	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	Tingkat kemiskinan	5,14	4,69	4,24	3,79	3,34	3,34
				Tingkat Pengangguran Terbuka	4,84	4,72	4,60	4,48	4,36	4,36
		9	Meningkatnya Pendapatan masyarakat	Pengeluaran per Kapita	11,15	11,228	11,328	11,378	11,453	11,453
				Indeks Gini	0,296	0,294	0,292	0,290	0,288	0,288
4	Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis			Indeks Rasa Aman	Aman (86,04)	Aman (86,20)	Aman (86,39)	Aman (89,09)	Aman (91,78)	Aman (91,78)
		10	Meningkatnya penerapan nilai-nilai adat budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat	Persentase Pemajuan Kebudayaan	65,42	68,00	71,00	74,00	77,00	77,00
				Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan	75	80	85	90	95	95
		11	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran	100	100	100	100	100	100
				Ketentraman dan Ketertiban Umum						
		12	Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial	Angka PPKS	5,68	4,87	4,68	4,49	4,30	4,30

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	Kondisi Awal (2022)	Outlook 2023	2024	2025	2026	Target Akhir Perencanaan
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
5	Terwujudnya infrastruktur dan Lingkungan hidup yang berkualitas			Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	90,96	91,16	91,36	91,56	91,76	91,76
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,61	66,80	67-68	66,76	69-70	69-70
		13	Terbangunnya Infrastruktur LayananDasar Perkotaan yang Berkualitas	IKLI kePUan	89,66	89,86	90,06	90,26	90,46	90,46
				IKLI perkim	96,8	96,85	96,90	96,92	96,95	96,95
				IKLI perhubungan	96,62	96,69	96,76	96,83	96,90	96,90
		14	Meningkatnya konsistensi penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	82	82,5	83	83,5	84	84
		15	Meningkatnya kualitas udara dantutupan lahan	Indeks Kualitas Air	46,07	46,5	45,75	46,5	47,25	47,25
				Indeks Kualitas Udara	91,29	91,5	90,05	90,10	90,15	90,15
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	56,18	56,18	57,00	57,50	58,00	58,0

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Padang Panjang, Bappeda berkontribusi untuk mewujudkan Tujuan yang ada dalam RPD yaitu tujuan 2 (dua). yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Professional, Bersih Dan Akuntabel”**, Indikatornya Indeks Reformasi Birokrasi dengan sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan indikator yang akan dicapai: Nilai SAKIP.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai lembaga teknis perencanaan, Bappeda Kota Padang Panjang mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Dengan adanya kontribusi tersebut, diharapkan dari aspek perencanaan dan aspek penelitian dan pengembangan, dapat diwujudkan bersama seluruh *stakeholder*.

3.1.4. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

1. Telaahan Renstra Kementerian /Lembaga

Keselarasan perencanaan antara tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, dalam penyusunan Renstra dilakukan telaah terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Kabupaten/Kota. Telaah terutama dilakukan untuk mengetahui sasaran strategis baik dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas maupun Renstra Bappeda Kabupaten/Kota di Sumatera Barat terutama yang terkait langsung dengan pelayanan Bappeda Kota Padang Panjang.

Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029 sedang dalam proses penyusunan karena RPJMN belum ditetapkan oleh sebab itu sebagai pedoman transisi kita lihat Renstra Tahun 2020-2024 dengan Tujuan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional dengan Indikator Sasaran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional, dengan Indikator Sasaran Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional;
- c. Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner, dengan Indikator Sasaran (1) Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L, dan (2) Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L.

- d. Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM, dengan Indikator Sasaran (1) Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas, (2) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional, (3) Integrasi Data dan Infomrasi Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Telaahan Renstra BRIN

Pada saat ini belum ditetapkan Renstra 2025-2029, oleh sebab itu sementara kita mengacu pada Peraturan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Badan Riset Dan Inovasi Nasional Tahun 2022-2024. Dalam rangka menjalankan amanah sesuai tugas dan fungsinya, BRIN menetapkan visi sebagai ***“Badan Riset dan Inovasi Nasional yang andal, profesional, inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”***. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas, misi Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi serta melakukan monitoring pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA,
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana riset dan inovasi penyelenggaraan ketenaganukliran, dan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA,
- 3) Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan.

Berdasarkan pada Visi dan misi BRIN seperti yang dikemukakan di atas, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan bersifat operasional dimana berupa perumusan Sasaran Strategis sebagaimana dijabarkan di bawah ini.

- 1) Meningkatnya keunggulan riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat dijadikan kebijakan berbasis bukti yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan;
- 2) Meningkatnya kolaborasi dalam pengembangan dan pemanfaatan produk ilmu pengetahuan berdasarkan prioritas pembangunan berkelanjutan;

- 3) Meningkatnya penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan kerentanan iklim;
- 4) Meningkatnya produktivitas dan daya saing sumber daya riset dan inovasi BRIN;
- 5) Implementasi Reformasi Birokrasi BRIN sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.;

3. Telaahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 terdapat enam isu strategis tiga diantaranya serupa dengan isu strategis pada Badan Perencanaan, penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang: pertama, Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan; kedua, Konsistensi dan sinergitas antar dokumen perencanaan, serta konsistensi perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah; dan ketiga Mengoptimalkan hasil pengendalian dan evaluasi menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 3.3
Permasalahan dan Isu Strategis Renstra BAPPEDA Sumbar Tahun 2021-2026

No.	Permasalahan	Isu Strategis
1.	Proses Tahapan Perencanaan Belum Optimal a. Pengendalian terhadap tindak lanjut hasil pelaksanaan Musrenbang belum optimal. b. Pengendalian terhadap pelaksanaan Forum OPD belum optimal.	Optimalisasi perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas
2.	Dokumen perencanaan pembangunan belum seutuhnya dijadikan pedoman oleh OPD: a. Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar tingkat pemerintahan belum optimal. b. Perencanaan penganggaran pada dokumen perencanaan belum optimal didasarkan pada skala prioritas pembangunan. c. Perumusan tolok ukur kinerja belum sepenuhnya mendukung capaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan. d. Perencanaan dan penganggaran pada dokumen perencanaan belum sepenuhnya berdasarkan analisa kebutuhan.	1. Kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum optimal. 2. Konsistensi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 3. Peningkatan peran BAPPEDA Sumatera Barat sebagai katalisator pembangunan daerah 4. Regulasi terhadap tahapan dan mekanisme penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran serta sistim informasi pembangunan daerah yang belum optimal dari pusat.
3.	Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal.	1. Optimalisasi Hasil Monitoring Dan Evaluasi untuk Kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

No.	Permasalahan	Isu Strategis
	a. Evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan belum optimal. b. Ketersediaan hasil analisa data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah belum optimal. c. Dukungan SKPD terhadap pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah belum optimal. d. Pengendalian pembangunan belum diperkuat dan difungsikan menjadi salah satu kontributor yang mempengaruhi tingkat pencapaian sasaran prioritas daerah.	2. Dokumen perencanaan dan penganggaran berdasarkan Tematik, Holistik, Integritas, Spasial 3. Optimalisasi hasil analisa data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah

4. Telaahan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Sumatera Barat

Berdasarkan telaahan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan tupoksi OPD, visi, misi dan program Gubernur Sumatera Barat, maka isu-isu strategis Badan Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:

- Kapasitas pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
- Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah.
- Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi untuk percepatan pembangunan daerah.
- Kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) kelitbang.
- Tata kelola penyelenggaraan kelitbang.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Bappeda Kota Padang Panjang yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab III, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih, maka dirumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran merupakan salah satu komponen dari perencanaan strategis, yang menunjukkan hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi Kepala Daerah terpilih selama kurun waktu lima tahun kedepan. Tujuan pembangunan Bappeda Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah

daerah, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai selama tahun 2024-2026 adalah Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran serta indikator masing-masing sasaran dan target kinerja tahunan dapat dijelaskan melalui Tabel berikut.

Tabel. 3.4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD
BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	7	9
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah		Nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP Kota	19,19	19,46	19,72
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	70,00	70,50	71,00
		Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif

3.3. Program dan Kegiatan

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2025 antara lain adalah :

1. Penetapan tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.
2. Penetapan Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026
3. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD tahun kelima, serta Renja Bappeda sampai dengan Tahun 2023.
4. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan Bappeda.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranan dan Prasarana
2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

- 1) Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
- 2) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
- 3) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 1) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 1) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- d. Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
 - 1) Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - 1) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - 2) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 - 1) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
 - c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - 1) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
 - a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - 1) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
 - b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
 - 1) Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan

- c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - 1) Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
- d. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 - 1) Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja dan pendanaan indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5

**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Padang Panjang**

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					6,643,996,059				21.042.068.566
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					6,643,996,059				21.042.068.566
PERENCANAAN					6,518,996,059				20.917.068.566
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Kota Padang Panjang	100,00%	5,723,607,869			100,00%	5.341.268.566
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Padang Panjang	100%	4,320,901,309	DAU		100%	3.902.068.566
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	462 Orang/bulan	4,320,901,309	DAU		462 Orang/bulan	3.902.068.566
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Padang Panjang	0%	0			0%	-
X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Padang Panjang	0 Paket	0			0 Paket	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kota Padang Panjang	100%	419,588,560	DAU		100%	554.200.000
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	4 Paket	4,100,000	DAU		4 Paket	4.100.000
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	4 Paket	50,488,560	DAU		4 Paket	70.000.000
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Padang Panjang	4 Paket	15,000,000	DAU		4 Paket	30.000.000
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	24 Laporan	350,000,000	DAU		24 Laporan	450.000.000
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	Kota Padang Panjang	100%	400,000,000	DAU		100%	330.000.000
X.XX.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Padang Panjang	1 Unit	350,000,000	DAU		1 Unit	270.000.000
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Padang Panjang	6 Unit	50,000,000	DAU		6 Unit	60.000.000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Kota Padang Panjang	100%	305,400,000	DAU		100%	227.000.000
X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	4 Laporan	3,000,000	DAU		4 Laporan	3.000.000
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Padang Panjang	36 Laporan	0	DAU		36 Laporan	39.000.000
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	12 Laporan	302,400,000	DAU		12 Laporan	185.000.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	Kota Padang Panjang	100%	277,718,000	DAU		100%	328.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Padang Panjang	20 Unit	237,718,000	DAU		20 Unit	248.000.000
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Padang Panjang	50 Unit	40,000,000	DAU		50 Unit	30.000.000
X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Padang Panjang	1 Unit	0	DAU		1 Unit	50.000.000
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	Kota Padang Panjang	84,00%	620,540,240			86,00%	15.415.800.000
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan	Kota Padang Panjang	2 dokumen	565,540,240	PAD		3 dokumen	15.265.800.000
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Kota Padang Panjang	1 Dokumen	35,000,000	PAD		1 Dokumen	35.000.000
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	2 Berita Acara	100,000,000	PAD		1 Berita Acara	7.000.000
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Kota Padang Panjang	6 Dokumen	430,540,240	PAD		4 Dokumen	15.160.800.00
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat ketersediaan data perencanaan pembanguinan pada OPD dalam sistem pengelolaan data	Kota Padang Panjang	87%	15,000,000	PAD		88%	15.000.000
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Kota Padang Panjang	1 Dokumen	15,000,000	PAD		1 Dokumen	15.000.000
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Kota Padang Panjang	4 dokumen	15,000,000	PAD		4 dokumen	15.000.000
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kota Padang Panjang	10 Laporan	15,000,000	PAD		10 Laporan	15.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah modul aplikasi yang dikembangkan	Kota Padang Panjang	5 modul	25,000,000	PAD		5 modul	25.000.000
5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Kota Padang Panjang	41 Dokumen	25,000,000	PAD		41 Dokumen	25.000.000
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	Kota Padang Panjang	88,00%	174,847,950			92,00%	160.000.000
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Kota Padang Panjang	88%	75,000,000	PAD		92%	75.000.000
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Padang Panjang	13 Laporan	35,000,000	PAD		13 Laporan	35.000.000
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Kota Padang Panjang	13 Laporan	40,000,000	PAD		13 Laporan	40.000.000
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang perekonomian dan SDA	Kota Padang Panjang	88%	49,847,950	PAD		92%	35.000.000
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Kota Padang Panjang	8 Laporan	49,847,950	PAD		8 Laporan	35.000.000
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang infrastruktur dan kewilayahan	Kota Padang Panjang	88%	50,000,000	PAD		92%	50.000.000
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Kota Padang Panjang	2 Laporan	50,000,000	PAD		2 Laporan	50.000.000
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					125,000,000				125.000.000
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah dokumen kelitbangan yang dihasilkan		8 Dokumen	125,000,000			10 Dokumen	125.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase inovasi daerah yang memiliki nilai kematangan di atas 90		74,00%				76,00%	-
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun	Kota Padang Panjang	1 dokumen	15,000,000	DAU PERUNTUKAN		3 dokumen	20.000.000
5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kota Padang Panjang	1 Laporan	15,000,000	DAU PERUNTUKAN		1 Laporan	20.000.000
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang sosial dan kependudukan yang disusun	Kota Padang Panjang	1 dokumen	22,500,000	DAU PERUNTUKAN		1 dokumen	20.000.000
5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kota Padang Panjang	1 Dokumen	22,500,000	DAU PERUNTUKAN		1 Dokumen	20.000.000
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun	Kota Padang Panjang	1 dokumen	22,500,000	DAU PERUNTUKAN		1 dokumen	20.000.000
5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kota Padang Panjang	1 Dokumen	22,500,000	DAU PERUNTUKAN		1 Dokumen	20.000.000
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi daerah yang masuk pengukuran indeks inovasi daerah	Kota Padang Panjang	100%	65,000,000	PAD		100%	65.000.000
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Padang Panjang	1 Dokumen	65,000,000	PAD		1 Dokumen	65.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025 serta Review Renstra Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026;
2. Mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 - 2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025. Secara umum Bappeda bertugas menkoordinasikan pencapaian seluruh 1 (satu) indikator tujuan dan 2 (dua) indikator sasaran pembangunan daerah. Namun secara khusus, Bappeda memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP Kota” dan indikator sasaran “Indeks kualitas perencanaan pembangunan dan Indeks Inovasi Daerah”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian pengembangan inovasi dan pengendalian daerah, serta infrastruktur pengembangan wilayah dalam kerangka pembangunan daerah Kota Padang Panjang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Bappeda Kota Padang Panjang
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan;
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

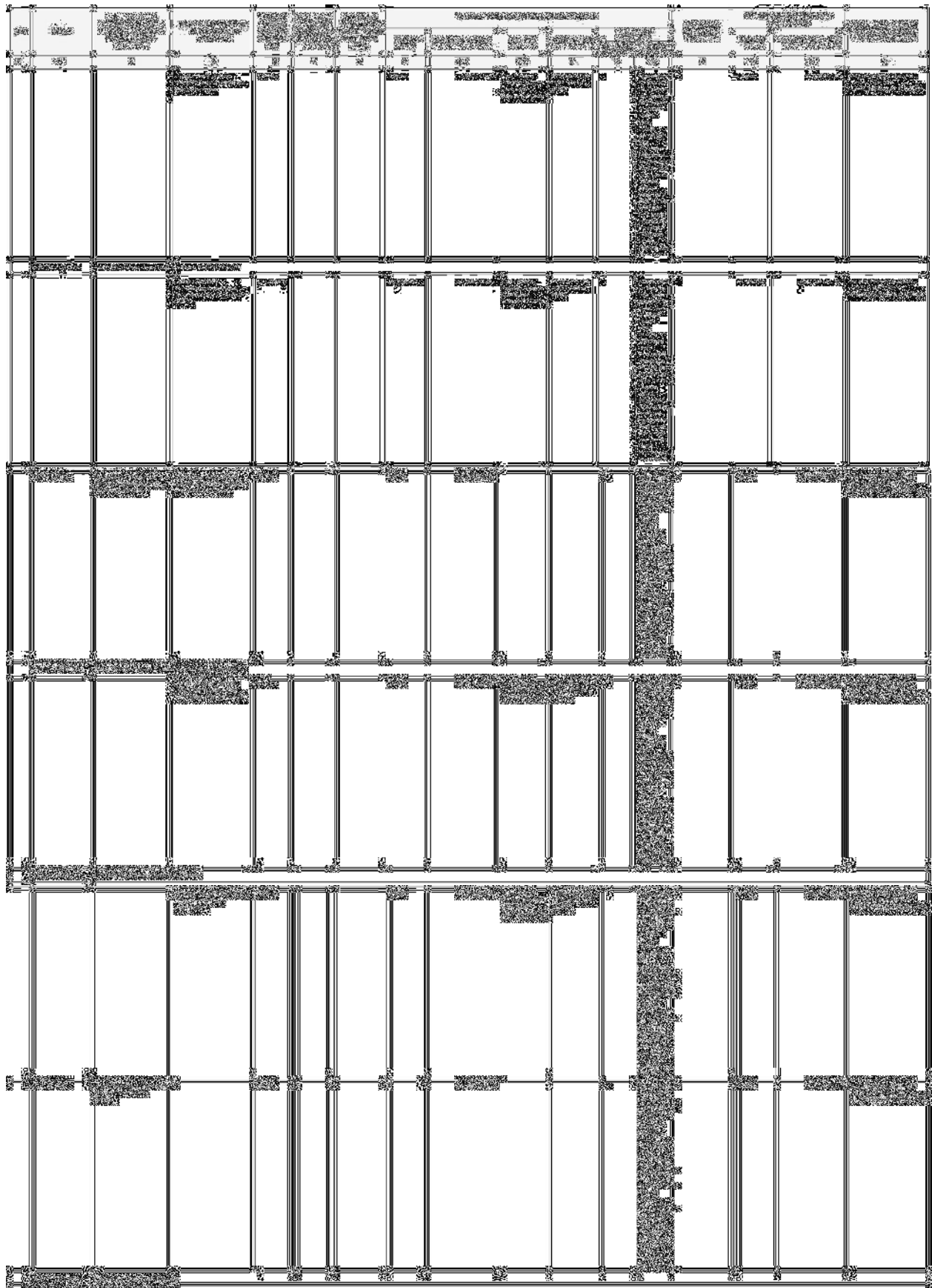
Secara rinci rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2025 sebagaimana table 4.1 berikut :

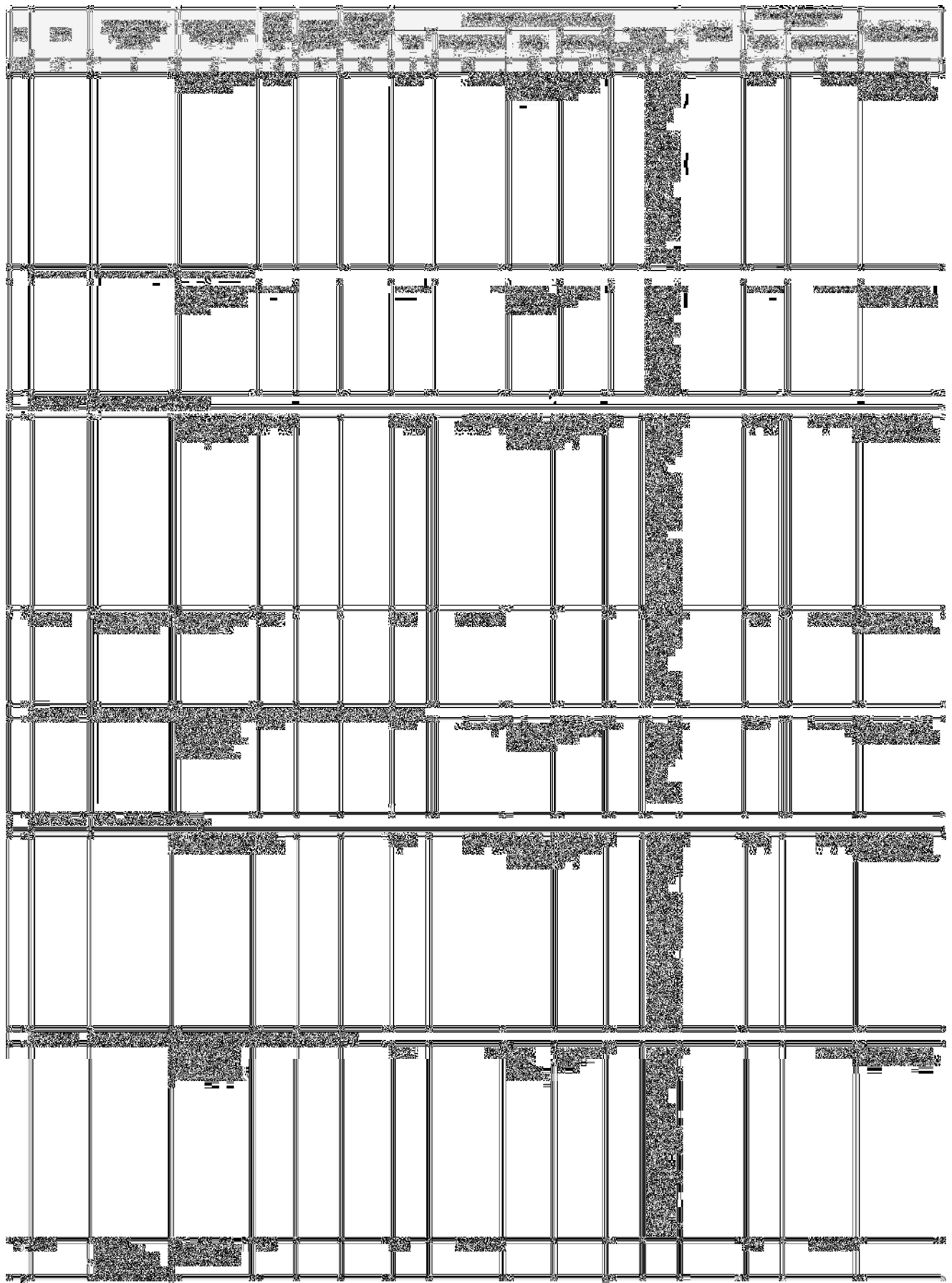
Tabel 4.1

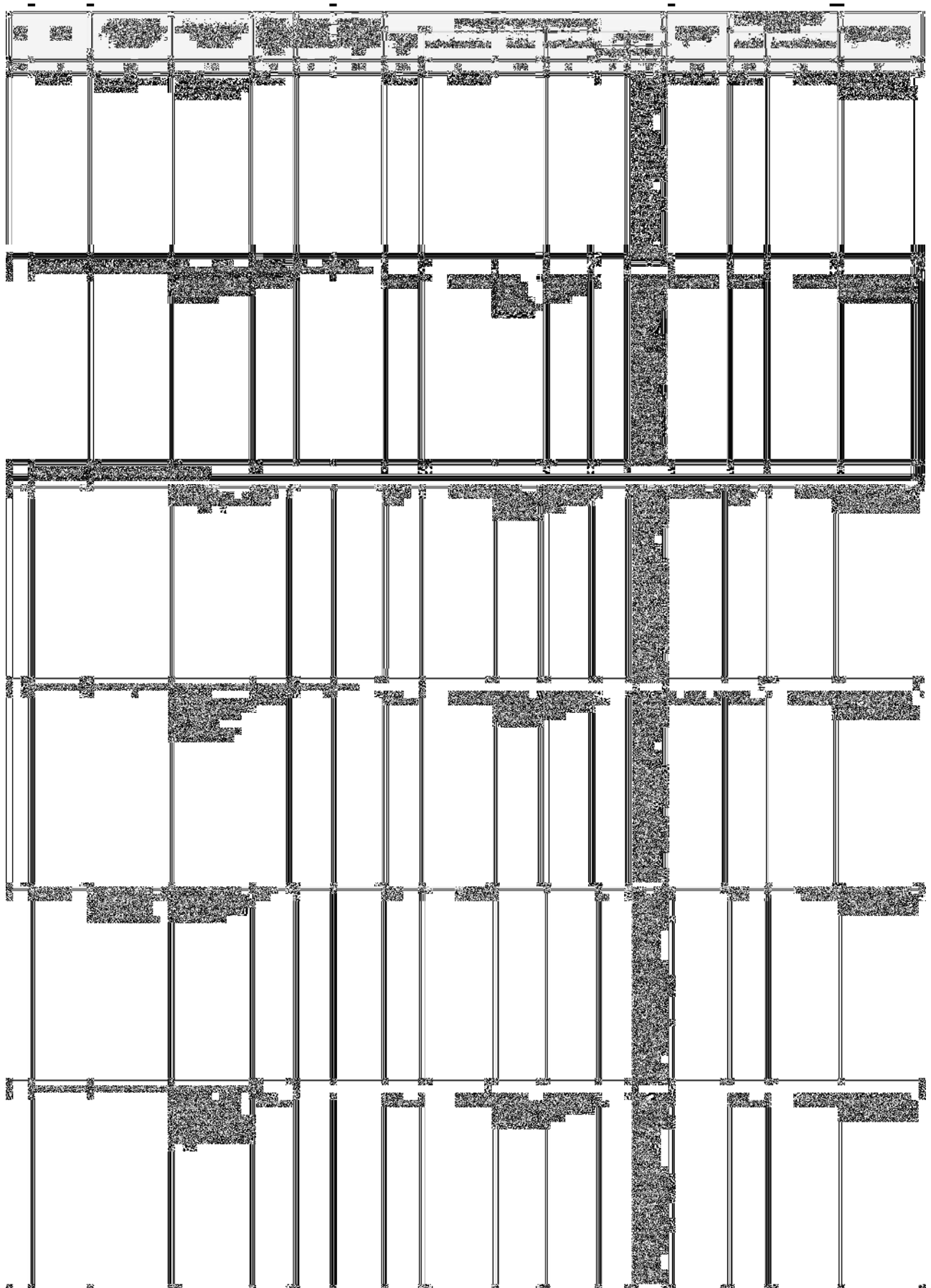
**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODA PERENCANAAN OPD	SIARAN SASARAN TAHUN 2023	PRAKARANGAN / TARGET RENCANA TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KETERANGAN PENCAPAIAN					KELOMPOK / SUMBER	PRASARANA / BUKU / LAMPIRAN / LAMPIRAN		PERINGKAT / DOKUMEN / LAMPIRAN / LAMPIRAN	
							URUSAN 2023	PACU INDIKATOR (R)	LOKASI	SILABUS / KEGIATAN	PENCAPAIAN		TARGET	PACU INDIKATOR (R)		
											1					2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								0.043.000.000.00							0.043.000.000.00	
								0.043.000.000.00							0.043.000.000.00	
								0.000.000.000.00							0.000.000.000.00	
1	5.1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penerapan program dan kegiatan yang ada di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. Penunjang Daerah 2. Penunjang Daerah	100 %			100 %	5.723.677.000.00						100 %	5.841.258.550.00	
	5.1.01.01	Adm. dan Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan program dan kegiatan yang ada di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. Penunjang Daerah 2. Penunjang Daerah	100 %			100 %	5.723.677.000.00						100 %	5.841.258.550.00	
	5.1.01.01.01	Adm. dan Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan program dan kegiatan yang ada di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. Penunjang Daerah 2. Penunjang Daerah	100 %			100 %	5.723.677.000.00						100 %	5.841.258.550.00	
	5.1.01.01.01.01	Adm. dan Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan program dan kegiatan yang ada di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. Penunjang Daerah 2. Penunjang Daerah	100 %			100 %	5.723.677.000.00						100 %	5.841.258.550.00	
	5.1.01.01.01.01.01	Adm. dan Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan program dan kegiatan yang ada di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. Penunjang Daerah 2. Penunjang Daerah	100 %			100 %	5.723.677.000.00						100 %	5.841.258.550.00	
	5.1.01.01.01.01.01.01	Adm. dan Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan program dan kegiatan yang ada di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. Penunjang Daerah 2. Penunjang Daerah	100 %			100 %	5.723.677.000.00						100 %	5.841.258.550.00	
	5.1.01.01.01.01.01.01.01	Adm. dan Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan program dan kegiatan yang ada di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. Penunjang Daerah 2. Penunjang Daerah	100 %			100 %	5.723.677.000.00						100 %	5.841.258.550.00	
	5.1.01.01.01.01.01.01.01.01	Adm. dan Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan program dan kegiatan yang ada di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. Penunjang Daerah 2. Penunjang Daerah	100 %			100 %	5.723.677.000.00						100 %	5.841.258.550.00	
	5.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Adm. dan Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan program dan kegiatan yang ada di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. Penunjang Daerah 2. Penunjang Daerah	100 %			100 %	5.723.677.000.00						100 %	5.841.258.550.00	
	5.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Adm. dan Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan program dan kegiatan yang ada di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. Penunjang Daerah 2. Penunjang Daerah	100 %			100 %	5.723.677.000.00						100 %	5.841.258.550.00	
	5.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Adm. dan Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan program dan kegiatan yang ada di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. Penunjang Daerah 2. Penunjang Daerah	100 %			100 %	5.723.677.000.00						100 %	5.841.258.550.00	
	5.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Adm. dan Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan program dan kegiatan yang ada di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. Penunjang Daerah 2. Penunjang Daerah	100 %			100 %	5.723.677.000.00						100 %	5.841.258.550.00	
	5.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Adm. dan Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan program dan kegiatan yang ada di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. Penunjang Daerah 2. Penunjang Daerah	100 %			100 %	5.723.677.000.00						100 %	5.841.258.550.00	
	5.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Adm. dan Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan program dan kegiatan yang ada di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. Penunjang Daerah 2. Penunjang Daerah	100 %			100 %	5.723.677.000.00						100 %	5.841.258.550.00	
	5.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Adm. dan Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan program dan kegiatan yang ada di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. Penunjang Daerah 2. Penunjang Daerah	100 %			100 %	5.723.677.000.00						100 %	5.841.258.550.00	
	5.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Adm. dan Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan program dan kegiatan yang ada di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. Penunjang Daerah 2. Penunjang Daerah	100 %			100 %	5.723.677.000.00						100 %	5.841.258.550.00	
	5.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Adm. dan Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan program dan kegiatan yang ada di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. Penunjang Daerah 2. Penunjang Daerah	100 %			100 %	5.723.677.000.00						100 %	5.841.258.550.00	
	5.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Adm. dan Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan program dan kegiatan yang ada di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. Penunjang Daerah 2. Penunjang Daerah	100 %			100 %	5.723.677.000.00						100 %	5.841.258.550.00	
	5.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Adm. dan Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan program dan kegiatan yang ada di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. Penunjang Daerah 2. Penunjang Daerah	100 %			100 %	5.723.677.000.00						100 %	5.841.258.550.00	
	5.1.01	Adm. dan Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan program dan kegiatan yang ada di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. Penunjang Daerah 2. Penunjang Daerah	100 %			100 %	5.723.677.000.00						100 %	5.841.258.550.00	
	5.1.01	Adm. dan Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan program dan kegiatan yang ada di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. Penunjang Daerah 2. Penunjang Daerah	100 %			100 %	5.723.677.000.00						100 %	5.841.258.550.00	
	5.1.01	Adm. dan Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan program dan kegiatan yang ada di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. Penunjang Daerah 2. Penunjang Daerah	100 %			100 %	5.723.677.000.00						100 %	5.841.258.550.00	
	5.1.01	Adm. dan Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan program dan kegiatan yang ada di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. Penunjang Daerah 2. Penunjang Daerah	100 %			100 %	5.723.677.000.00						100 %	5.841.258.550.00	
	5.1.01	Adm. dan Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan program dan kegiatan yang ada di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. Penunjang Daerah 2. Penunjang Daerah	100 %			100 %	5.723.677.000.00						100 %	5.841.258.550.00	
	5.1.01	Adm. dan Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan program dan kegiatan yang ada di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. Penunjang Daerah 2. Penunjang Daerah	100 %			100 %	5.723.677.000.00						100 %	5.841.258.550.00	
	5.1.01	Adm. dan Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan program dan kegiatan yang ada di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. Penunjang Daerah 2. Penunjang Daerah	100 %			100 %	5.723.677.000.00						100 %	5.841.258.550.00	
	5.1.01	Adm. dan Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan program dan kegiatan yang ada di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. Penunjang Daerah 2. Penunjang Daerah	100 %			100 %	5.723.677.000.00						100 %	5.841.258.550.00	
	5.1.01	Adm. dan Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan program dan kegiatan yang ada di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. Penunjang Daerah 2. Penunjang Daerah	100 %			100 %	5.723.677.000.00						100 %	5.841.258.550.00	
	5.1.01	Adm. dan Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan program dan kegiatan yang ada di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. Penunjang Daerah 2. Penunjang Daerah	100 %			100 %	5.723.677.000.00						100 %	5.841.258.550.00	
	5.1.01	Adm. dan Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan program dan kegiatan yang ada di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. Penunjang Daerah 2. Penunjang Daerah	100 %			100 %	5.723.677.000.00						100 %	5.841.258.550.00	
	5.1.01	Adm. dan Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan program dan kegiatan yang ada di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. Penunjang Daerah 2. Penunjang Daerah	100 %			100 %	5.723.677.000.00						100 %	5.841.258.550.00	
	5.1.01	Adm. dan Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan program dan kegiatan yang ada di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. Penunjang Daerah 2. Penunjang Daerah	100 %			100 %	5.723.677.000.00						100 %	5.841.258.550.00	
	5.1.01	Adm. dan Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan program dan kegiatan yang ada di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. Penunjang Daerah 2. Penunjang Daerah	100 %			100 %	5.723.677.000.00						100 %	5.841.258.550.00	
	5.1.01	Adm. dan Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan program dan kegiatan yang ada di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. Penunjang Daerah 2. Penunjang Daerah	100 %			100 %	5.723.677.000.00						100 %	5.841.258.550.00	
	5.1.01	Adm. dan Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan program dan kegiatan yang ada di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. Penunjang Daerah 2. Penunjang Daerah	100 %			100 %	5.723.677.000.00						100 %	5.841.258.550.00	
	5.1.01	Adm. dan Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan program dan kegiatan yang ada di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. Penunjang Daerah 2. Penunjang Daerah	100 %			100 %	5.723.677.000.00						100 %	5.841.258.550.00	
	5.1.01	Adm. dan Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan program dan kegiatan yang ada di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. Penunjang Daerah 2. Penunjang Daerah	100 %			100 %	5.723.677.000.00						100 %	5.841.258.550.00	
	5.1.01	Adm. dan Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan program dan kegiatan yang ada di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. Penunjang Daerah 2. Penunjang Daerah	100 %			100 %	5.723.677.000.00						100 %	5.841.258.550.00	
	5.1.01	Adm. dan Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan program dan kegiatan yang ada di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. Penunjang Daerah 2. Penunjang Daerah	100 %			100 %	5.723.677.000.00						100 %	5.841.258.550.00	
	5.1.01	Adm. dan Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan program dan kegiatan yang ada di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. Penunjang Daerah 2. Penunjang Daerah	100 %			100 %	5.723.677.000.00						100 %	5.841.258.550.00	
	5.1.01	Adm. dan Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan program dan kegiatan yang ada di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. Penunjang Daerah 2. Penunjang Daerah	100 %			100 %	5.723.677.000.00						100 %	5.841.258.550.00	
	5.1.01	Adm. dan Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan program dan kegiatan yang ada di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. Penunjang Daerah 2. Penunjang Daerah	100 %			100 %	5.723.677.000.00						100 %	5.841.258.550.00	
	5.1.01	Adm. dan Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan program dan kegiatan yang ada di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. Penunjang Daerah 2. Penunjang Daerah	100 %			100 %	5.723.677.000.00						100 %	5.841.258.550.00	
	5.1.01	Adm. dan Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan program dan kegiatan yang ada di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. Penunjang Daerah 2. Penunjang Daerah	100 %			100 %	5.723.677.000.00						100 %	5.841.258.550.00	
	5.1.01	Adm. dan Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan program dan kegiatan yang ada di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. Penunjang Daerah 2. Penunjang Daerah	100 %			100 %	5.723.677.000.00						100 %	5.841.258.550.00	
	5.1.01	Adm. dan Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan program dan kegiatan yang ada di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. Penunjang Daerah 2. Penunjang Daerah	100 %			100 %	5.723.677.000.00						100 %	5.841.258.550.00	
	5.1.01	Adm. dan Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan program dan kegiatan yang ada di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. Penunjang Daerah 2. Penunjang Daerah	100 %			100 %	5.723.677.000.00						100 %	5.841.258.550.00	
	5.1.01	Adm. dan Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan program dan kegiatan yang ada di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. Penunjang Daerah 2. Penunjang Daerah	100 %			100 %	5.723.677.000.00						100 %	5.841.258.550.00	
	5.1.01.															

[illegible]

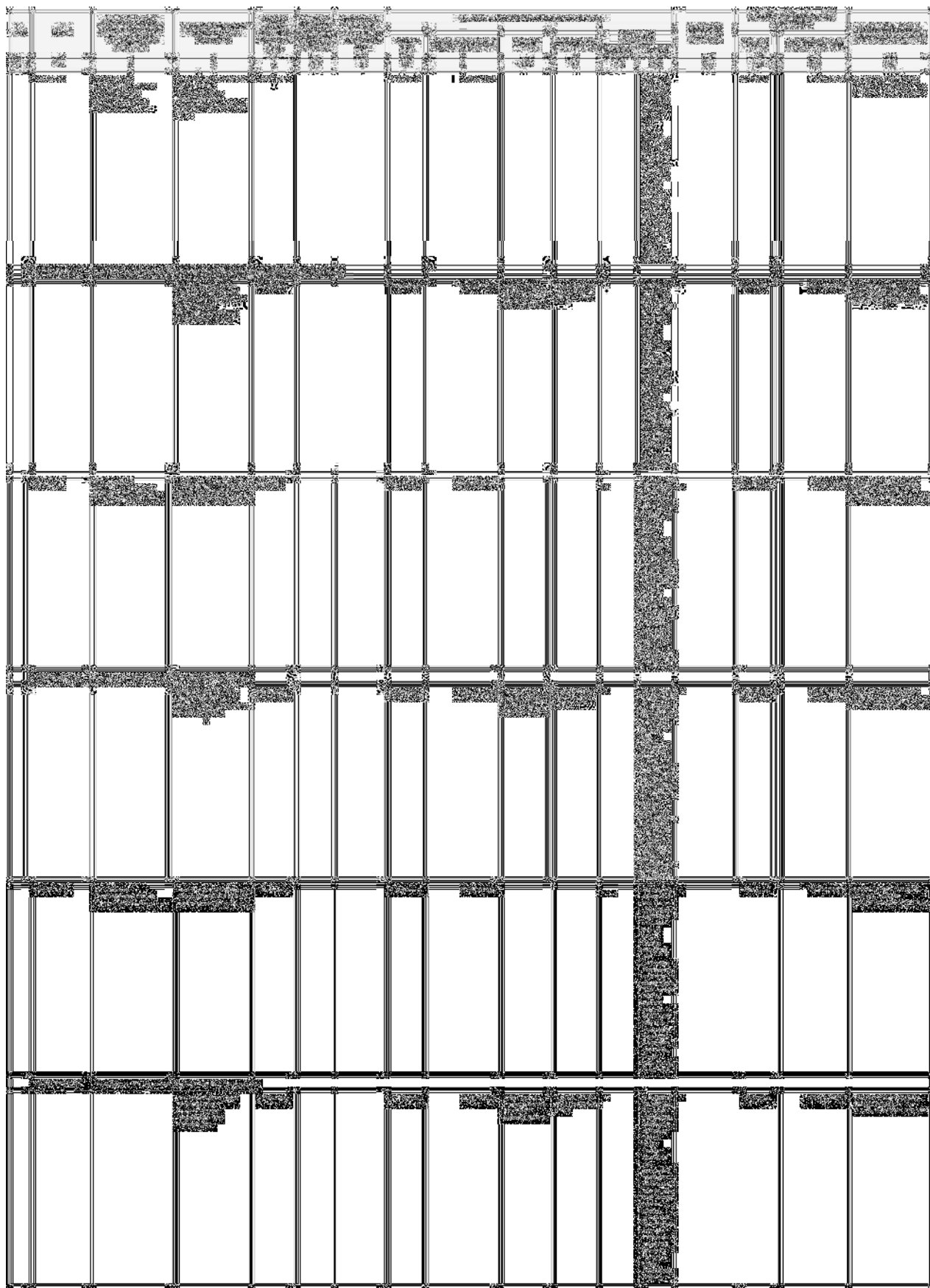


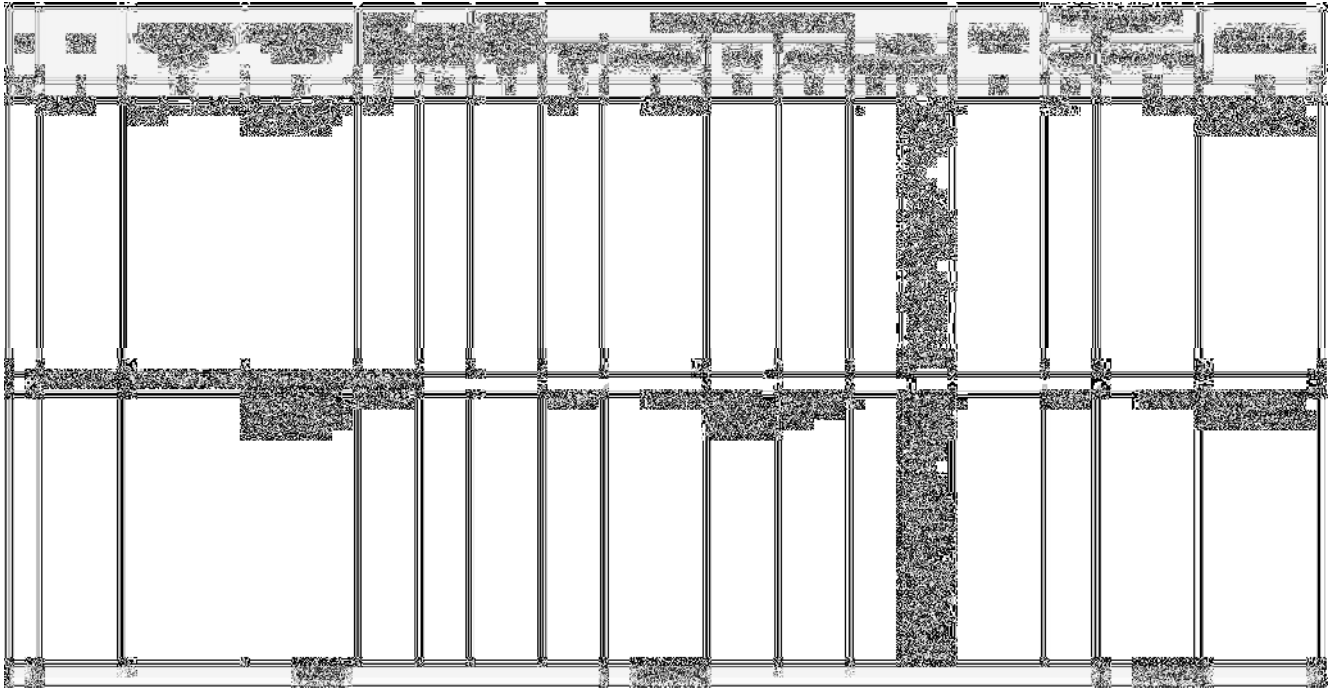






Renja BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2025 | 62





BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting dalam rangka mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat. Penyusunan Renja seharusnya mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru. Semua itu akhirnya menuju pada proses menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya berkaitan langsung kepada masyarakat, sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang Panjang Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2025. Perencanaan program dan kegiatan tersebut memperhatikan dan menganalisis isu-isu penting dalam pembangunan yang patut ditindaklanjuti. Selanjutnya, penyusunan program dan kegiatan pada Renja Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun berdasarkan indikator dan target kinerja serta pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025. Ketersediaan anggaran sesuai dengan pagu indikatif memerlukan komitmen semua pihak yang terkait dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran sehingga program dan kegiatan yang diusulkan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Namun hal ini bukan suatu kemutlakan, tentunya disesuaikan pula dengan kebutuhan prioritas pembangunan daerah serta ketersediaan dana.

Renja Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2025 yang dilengkapi dengan indikator serta target pencapaian kinerja akan menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja Bappeda Kota Padang Panjang selama tahun 2025. Terlaksananya Renja Bappeda Kota Padang Panjang sesuai dengan indikator dan target pencapaian kinerja tergantung kepada koordinasi dan komitmen seluruh pihak terkait pada Bappeda Kota Padang Panjang.

Padang Panjang, Juli 2024
**Plt. Kepala Badan Perencanaan Penelitian
Dan Pengembangan Daerah
Kota Padang Panjang**

Argus Saadah, S.Sos, M.Si
NIP. 19721016 199303 2 001